

Media Sosial dan Jurnalisme Digital-Born dalam Demokrasi Digital: Implikasi terhadap Praktik Kerja Jurnalis Online

Chairun Nisa Zempi¹, Dewanto Samodro², Gustiana Sabarina³

¹²³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: nisazempi@gmail.com



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Research Article

Kata Kunci:

Jurnalisme digital-born, media sosial, emokrasi digital

Keywords:

Digital-born journalism, social media, digital democracy

Article History

Dikirim : 20 Januari 2026

Diterima: 4 Februari 2026

Dipublikasi: 20 Februari 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap praktik kerja jurnalis media digital-born serta bagaimana jurnalis memaknai peran profesional mereka dalam konteks demokrasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap jurnalis yang bekerja di media digital-born di Indonesia. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus melalui tahapan *open coding* dan *axial coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial diposisikan sebagai infrastruktur awal untuk memantau isu politik dan dinamika opini publik, namun tidak dijadikan sebagai sumber legitimasi informasi. Di tengah tekanan kecepatan dan viralitas, jurnalis tetap menekankan pentingnya verifikasi, penilaian editorial, dan tanggung jawab etis. Temuan ini juga menunjukkan adanya negosiasi berkelanjutan antara logika platform media sosial dan nilai-nilai normatif jurnalisme, khususnya dalam agenda setting serta penanganan hoaks dan disinformasi politik. Penelitian ini menegaskan bahwa jurnalisme digital-born merupakan proses reposisi peran jurnalisme sebagai institusi demokrasi dalam menjaga kualitas diskursus politik di ruang publik digital.

ABSTRACT

This study aims to examine how social media influences the daily practices of digital-born journalists and how journalists negotiate their professional roles in the context of digital democracy. Employing a qualitative case study approach, this research is based on in-depth interviews with journalists working in Indonesian digital-born news organizations. The data were analyzed using NVivo 12 Plus through open and axial coding to identify key themes. The findings indicate that social media primarily functions as an initial infrastructure for monitoring political issues and public discourse rather than as a source of journalistic legitimacy. Despite strong pressures for speed and virality, journalists continue to emphasize verification, editorial judgment, and ethical responsibility. The study also reveals ongoing negotiations between platform logics and normative journalistic values, particularly in agenda setting and in responding to political disinformation and hoaxes. Overall, this study suggests that digital-born journalism represents a reconfiguration of journalism's democratic role in maintaining the quality of political discourse within the digital public sphere.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam cara demokrasi dijalankan, khususnya dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi politik. Di Indonesia, media sosial kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam mengakses berita dan informasi publik. Platform seperti Instagram, X, YouTube, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi interpersonal, tetapi juga sebagai ruang utama peredaran wacana politik. Kondisi ini menandai pergeseran ruang publik dari dominasi media massa konvensional menuju ruang digital yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif.

Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan bahwa 57% masyarakat menggunakan media sosial sebagai sumber berita, dan 40% mengandalkannya sebagai sumber utama, terutama di kalangan usia muda (18–24 tahun) yang mengakses berita melalui platform seperti TikTok, YouTube, dan Facebook (Park et al., 2025). Pergeseran ke ranah digital ini tidak hanya membuat informasi lebih mudah diakses oleh warga, tapi juga mengubah hubungan antara politisi, media tradisional, dan publik itu sendiri (Norris, 2017). Ruang publik yang dulu lebih bergantung pada media massa konvensional kini semakin banyak berpindah ke platform digital yang lebih terdesentralisasi dan memungkinkan partisipasi langsung dari banyak orang.

Penelitian ini berpijak pada konsep *public sphere* dari Jürgen Habermas (2006) yang memandang media sebagai ruang diskusi publik tempat opini politik dibentuk melalui pertukaran argumen rasional. Namun, dalam era digital, ruang publik tidak lagi sepenuhnya berada dalam struktur media massa tradisional, melainkan berkembang menjadi *networked public sphere* (Bates, 2007), di mana interaksi publik dimediasi oleh jaringan digital. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini terlihat dari meningkatnya peran media sosial dalam komunikasi politik sekaligus munculnya polarisasi dan segmentasi berbasis algoritma (Lim, 2017; Setiawati et al., 2023). Sejalan dengan konsep *platform society* (Dijck et al., 2018), platform digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi sebagai infrastruktur yang membentuk visibilitas informasi melalui algoritma dan metrik keterlibatan. Dalam konteks jurnalisme Indonesia, ketergantungan pada logika platform dan

distribusi berbasis engagement juga telah memengaruhi praktik kerja media (Nasrullah, 2020; Saroso, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *platformization of journalism* (Dijk et al., 2018) untuk menganalisis bagaimana jurnalisme digital-born di Indonesia menegosiasikan rutinitas kerja, seleksi isu, dan praktik verifikasi dalam struktur yang semakin dipengaruhi oleh logika platform digital.

Perkembangan media sosial juga telah mentransformasi praktik jurnalisme secara signifikan. Media sosial tidak lagi berperan sebagai pelengkap distribusi berita, melainkan menjadi arena utama sirkulasi informasi politik. Jurnalis dituntut bekerja dalam ritme yang lebih cepat, berhadapan langsung dengan audiens, serta beroperasi dalam ekosistem yang sangat dipengaruhi oleh metrik keterlibatan seperti klik, suka, komentar, dan bagikan. Tekanan tersebut berpotensi memengaruhi proses pemilihan isu, cara membingkai berita, hingga prioritas nilai-nilai jurnalistik dalam praktik sehari-hari (Nasrullah, 2020).

Dalam penelitian ini, media digital-born didefinisikan secara operasional sebagai organisasi media yang sejak awal berdiri dan beroperasi sepenuhnya di ranah digital, tanpa memiliki sejarah sebagai media cetak, radio, atau televisi konvensional. Berbeda dengan media arus utama yang melakukan transformasi digital, media digital-born menjadikan internet dan platform media sosial sebagai infrastruktur utama dalam seluruh proses jurnalistik—mulai dari perencanaan isu, produksi konten, distribusi, hingga interaksi dengan audiens (Nicholls et al., 2017). Karakteristik pembeda media digital-born meliputi: (1) model distribusi berbasis platform dan algoritma, (2) orientasi pada multiplatform publishing, (3) penggunaan metrik keterlibatan sebagai bagian dari evaluasi performa konten, serta (4) struktur redaksi yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap dinamika isu digital.

Dalam konteks Indonesia, media seperti Tirto.id dan Narasi sering dikategorikan sebagai media digital-born karena sejak awal dirancang untuk ekosistem digital dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap distribusi melalui media sosial. Dengan definisi ini, penelitian memfokuskan analisis pada bagaimana karakteristik struktural tersebut memengaruhi praktik kerja jurnalis dalam konteks demokrasi digital. Ketergantungan media digital-born terhadap media sosial

menjadikan praktik jurnalistik mereka sangat dipengaruhi oleh logika platform digital, seperti tuntutan kecepatan publikasi, visibilitas berbasis algoritma, serta kebutuhan tinggi akan keterlibatan audiens. Dalam konteks politik yang kompetitif dan sensitif, tekanan tersebut menempatkan jurnalis pada posisi yang rentan. Jurnalis tidak hanya dituntut untuk menyampaikan fakta, tetapi juga harus bernegosiasi dengan dorongan agar konten menjadi viral serta respons publik yang muncul secara instan di ruang digital (Lim, 2017). Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara idealisme jurnalistik dan tuntutan ekosistem media digital.

Berbagai penelitian telah mengkaji peran media sosial dalam komunikasi politik dan demokrasi (Bennett & Pfetsch, 2018b; Dania & Nisa, 2023; Elizamiharti & Nelfira, 2023; Nugroho, 2025), kajian mengenai implikasinya terhadap praktik jurnalisisme masih didominasi oleh pendekatan makro yang menyoroti sistem media (Andzani et al., 2024), perilaku audiens (Reguero-Sanz et al., 2023), atau polarisasi opini publik (Setiawati et al., 2023). Sementara itu, bagaimana jurnalis media digital-born secara konkret menegosiasikan tekanan logika platform seperti kecepatan, viralitas, dan metrik keterlibatan dengan nilai-nilai normatif jurnalisisme dalam konteks demokrasi digital Indonesia masih relatif kurang dieksplorasi secara empiris. Ketiadaan perspektif mikro ini menyebabkan pemahaman tentang reposisi peran jurnalisisme sebagai institusi demokrasi di ruang publik digital menjadi belum komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari problem mendasar mengenai bagaimana praktik kerja jurnalis digital-born dibentuk, dinegosiasikan, dan dimaknai di tengah dominasi media sosial, serta apa implikasinya terhadap kualitas diskursus politik dalam demokrasi digital Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Literatur mengenai media sosial dan demokrasi digital umumnya berkembang dalam dua arus utama. Arus pertama menekankan perluasan partisipasi dan keterbukaan ruang publik digital, dengan merujuk pada konsep *networked public sphere* yang memungkinkan distribusi opini politik secara lebih terdesentralisasi (Benkler, 2006). Dalam konteks Indonesia, studi Lim (2013, 2017)

menunjukkan bahwa media sosial membuka ruang partisipasi politik baru, tetapi sekaligus menciptakan fragmentasi dan polarisasi berbasis algoritma. Pendekatan ini cenderung melihat platform sebagai arena komunikasi yang memperluas akses, meskipun dengan konsekuensi sosial tertentu.

Arus kedua lebih kritis terhadap struktur platform itu sendiri. Perspektif *platform society* ((Dijck et al., 2018) dan konsep *platformization* (Poell et al., 2019) menekankan bahwa platform bukan sekadar ruang interaksi, melainkan infrastruktur yang membentuk logika visibilitas, distribusi, dan hierarki informasi melalui algoritma serta ekonomi perhatian. Dalam kerangka ini, relasi kuasa dalam ruang publik digital dipahami sebagai hasil dari struktur teknologis dan ekonomi yang mengondisikan praktik komunikasi.

Namun, dalam kajian jurnalisme, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perubahan pola konsumsi berita atau perilaku audiens (Nugroho, 2025; Setiawati et al., 2023) , sementara implikasi struktural platform terhadap praktik kerja jurnalis relatif kurang dieksplorasi, khususnya dalam konteks media digital-born di Indonesia. Beberapa studi internasional mulai membahas *platformization of journalism* (Westlund & Ekström, 2018) tetapi kajian empiris yang menempatkan jurnalis sebagai aktor yang menegosiasikan logika platform dan nilai normatif jurnalisme masih terbatas dalam konteks demokrasi Indonesia. penelitian ini memposisikan diri di antara dua pendekatan tersebut: tidak hanya melihat media sosial sebagai ruang partisipasi publik, tetapi sebagai struktur platform yang membentuk ulang praktik jurnalistik. Fokus penelitian ini bukan pada dampak media sosial terhadap audiens, melainkan pada bagaimana jurnalis media digital-born secara konkret menegosiasikan tekanan algoritmik, tuntutan kecepatan, dan metrik keterlibatan dengan tanggung jawab demokratis jurnalisme.

Perkembangan media sosial t mengubah secara signifikan cara kerja jurnalisme, mulai dari proses pembuatan berita, penyebarannya, hingga cara audiens mengonsumsinya. Kini, media sosial bukan lagi sekadar pelengkap bagi media massa tradisional, melainkan sudah menjadi arena utama tempat informasi termasuk berita politik beredar dengan cepat. Dalam situasi ini, para jurnalis harus

menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang jauh lebih cepat, distribusi berita yang dipengaruhi algoritma, serta interaksi langsung dengan pembaca atau penonton yang semakin aktif dan ikut serta (Nasrullah, 2020).

Studi-studi terbaru juga menegaskan bahwa media digital berperan penting dalam membentuk opini publik dan arah demokrasi secara keseluruhan, baik melalui penyebaran informasi politik maupun melalui mekanisme amplifikasi isu tertentu di media sosial (Elizamiharti & Nelfira, 2023; Fuchs, 2021). Oleh karena itu, ruang publik digital tidak dapat dipandang sebagai arena yang netral. Ruang ini dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, teknologi yang digunakan, serta berbagai aktor komunikasi di dalamnya. Situasi demikian menjadikan kajian tentang aktor-aktor yang beroperasi di ruang publik digital termasuk jurnalisme semakin relevan dan penting dalam studi politik serta demokrasi kontemporer.

Perkembangan media online hingga saat ini melalui tiga tahap. Tahap pertama yaitu media online hanya memproduksi konten yang tersedia di media tradisional. Berita-berita yang hadir di *website* online, dapat dikatakan sama atau mirip dengan media konvensional (seperti koran). Pada tahap kedua sudah bermunculan konten asli media online dan disertai dengan penambahan *hyperlink* yang memungkinkan akses ke informasi tambahan. Pada tahapan ketiga, media online telah menyajikan konten asli mereka yang tampilan dan gaya pemberitaannya dirancang khusus untuk internet (contohnya di Indonesia seperti *tirto.id*, *kumparan*, *beritagar*).

Tahapan ini juga memengaruhi nilai-nilai dan praktik jurnalistik sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial mendorong jurnalis untuk lebih peka terhadap isu-isu yang sedang ramai dibicarakan, tren obrolan di publik, serta angka-angka keterlibatan seperti klik, komentar, suka, dan bagikan. Hal tersebut berpotensi menggeser fokus jurnalisme dari melayani kepentingan publik menuju mengejar popularitas dan perhatian semata (Bennett & Pfetsch, 2018b). Akibatnya, pemilihan topik dan cara membingkai berita sering kali dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di media sosial. Oleh karena itu, perubahan dalam praktik jurnalisme di era media sosial ini bukan hanya soal teknologi semata, melainkan juga perubahan struktural yang memengaruhi peran

jurnalisme dalam mendukung demokrasi. Kondisi seperti ini membuat kajian tentang bagaimana jurnalis beradaptasi dan memaknai kembali peran mereka di tengah dominasi media sosial menjadi semakin penting dalam studi politik dan ilmu komunikasi

Globalisasi membawa bentuk perubahan pada bisnis media maupun jurnalisannya, salah satu dampaknya yaitu terbentuknya media yang bekerja secara online atau media online. Perusahaan media online terbagi menjadi dua yaitu perusahaan media tradisional yang melakukan pelebaran ekspansi pasar ke ranah digital dan perusahaan media baru yang berorientasi hanya pada bisnis media digital yang disebut dengan *digital-born news media* (Nicholls et al., 2017). Pada sisi bentuk jurnalisme, secara otomatis juga mengalami perubahan. Hingga saat ini terdapat dua kategori jurnalis yang sering diperbincangkan yaitu jurnalis tradisional dan jurnalis online (Henkel et al., 2020)

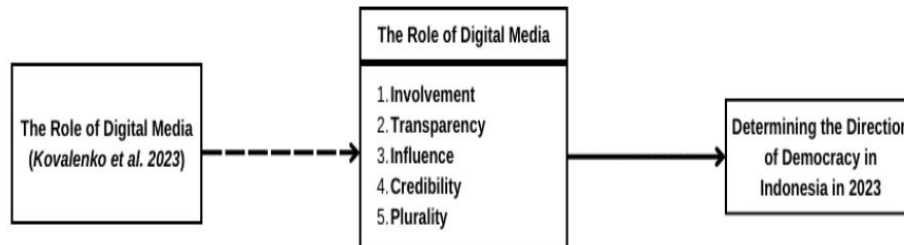
Berbeda dengan media arus utama yang awalnya berasal dari koran, televisi, atau radio lalu beradaptasi ke dunia online, media *digital-born* ini sejak awal menjadikan media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh proses jurnalistik—mulai dari mencari isu, memproduksi berita, hingga mendistribusikannya ke publik. Di Indonesia, perkembangan media semacam ini sejalan dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat mengonsumsi berita lewat platform media sosial, yang sekaligus membentuk pola hubungan baru antara jurnalis, media, dan audiens (Nasrullah, 2020; Nugroho, 2025)

Ketergantungan media *digital-born* terhadap media sosial membuat praktik jurnalistik mereka sangat dipengaruhi oleh logika platform, seperti keharusan menyajikan informasi dengan cepat, visibilitas yang ditentukan algoritma, serta tingkat keterlibatan audiens (*engagement*). Penelitian dari Lim (2013) bahwa di Indonesia menunjukkan dinamika ini ikut memengaruhi cara jurnalis memilih isu dan membingkai berita, terutama pada topik politik yang sensitif dan penuh persaingan terkait konteks politik digital. Dalam kondisi seperti itu, jurnalis di media *digital-born* tidak hanya bertugas menyampaikan fakta, tapi juga harus bernegosiasi dengan tuntutan agar konten menjadi viral serta tekanan opini publik yang langsung terasa di ruang digital.

Dalam kerangka demokrasi, posisi media *digital-born* ini cukup strategis di ruang publik digital, sehingga mereka menjadi aktor kunci dalam membentuk opini masyarakat dan diskursus politik. Namun, ketergantungan pada infrastruktur media sosial sebagai saluran distribusi utama juga menimbulkan tantangan bagi fungsi jurnalisme sebagai pilar demokrasi—khususnya dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan prioritas kepentingan publik di atas segalanya. Karena itu, kajian mendalam tentang praktik jurnalisme di media digital-born menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana peran jurnalisme dinegosiasikan dan dijalankan di tengah perubahan ruang publik digital di Indonesia.

Dalam kajian jurnalisme digital masa kini, media digital-born dipandang sebagai wujud dari perubahan mendasar dalam praktik jurnalisme. Perubahan ini ditandai oleh kecepatan produksi berita yang tinggi, pendekatan multiplatform, serta keterlibatan audiens yang lebih langsung dan interaktif. Penelitian terkini menunjukkan bahwa peran jurnalisme digital tidak lagi terbatas pada penyediaan informasi semata, melainkan juga mencakup pengelolaan arus informasi yang sangat dipengaruhi oleh algoritma platform, metrik keterlibatan (*engagement metrics*), serta logika operasional media digital (Indah Sulistiani et al., 2025). Hal ini menciptakan perbedaan yang cukup tajam antara jurnalisme digital-born dengan jurnalisme tradisional, khususnya dalam proses pemilihan isu dan pembingkai berita.

Ketergantungan media digital-born pada media sosial sebagai kanal distribusi utama juga ikut membentuk orientasi serta nilai-nilai jurnalistik yang dianut. Beberapa studi menyoroti bahwa algoritma media sosial cenderung mendorong outlet digital untuk lebih memprioritaskan topik-topik yang berpotensi tinggi menarik perhatian, seperti isu kontroversial atau konflik politik, demi menjaga visibilitas dan retensi audiens (Bennett & Pfetsch, 2018a; Saroso, 2024). Akibatnya, para jurnalis di media digital-born sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan kecepatan dan daya tarik viral dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang mendasar, seperti akurasi, proses verifikasi yang teliti, serta orientasi pada kepentingan publik.



Gambar 1. The role of digital Media

Sumber : Ahdarrijal & Rahmawati, (2024)

Gambar 1. memeprihakan bagaimana media digital memainkan peran strategis dalam demokrasi dan praktik jurnalisme kontemporer melalui (1) peningkatan keterlibatan publik, (2)transparansi informasi, (3) pengaruh terhadap opini publik, (4) kredibilitas media, (5)serta keberagaman suara dalam ruang publik. Media digital memungkinkan keterlibatan audiens yang lebih aktif melalui interaksi dua arah, seperti komentar dan berbagi konten, sehingga publik tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, melainkan juga partisipan dalam diskursus politik. Selain itu, media digital mendorong transparansi dengan mempermudah akses terhadap informasi serta membuka ruang bagi publik untuk memantau dan mengkritisi aktor politik maupun institusi media. Melalui kecepatan distribusi dan mekanisme amplifikasi di media sosial, media digital juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk agenda publik dan arah diskursus politik. Namun, dalam lingkungan digital yang sarat dengan arus informasi dan disinformasi, kredibilitas media menjadi faktor penentu kepercayaan publik terhadap jurnalisme, yang menuntut komitmen kuat terhadap prinsip akurasi dan verifikasi. Di sisi lain, media digital memperluas keberagaman suara dengan memungkinkan munculnya berbagai perspektif dan media alternatif, meskipun fragmentasi ruang publik dan polarisasi opini tetap menjadi tantangan dalam menjaga kualitas deliberasi demokratis.

Berbagai penelitian telah mengkaji peran media sosial dalam komunikasi politik dan

demokrasi, kajian mengenai implikasinya terhadap praktik jurnalisme masih didominasi oleh pendekatan makro yang menyoroti sistem media, polarisasi opini publik, atau perilaku audiens di ruang digital. Sejumlah studi menekankan bagaimana media sosial membentuk dinamika ruang publik dan memengaruhi kualitas demokrasi, baik dalam konteks global maupun Indonesia (Lim, 2013; Nasrullah, 2020; Nugroho, 2025). Namun demikian, perhatian terhadap pengalaman dan praktik jurnalis sebagai aktor kunci dalam ruang publik digital masih relatif terbatas.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam, khususnya yang menggali perspektif jurnalis itu sendiri: bagaimana mereka memaknai peran mereka dan menegosiasikan praktik jurnalistik di tengah dominasi media sosial sebagai ruang publik utama. Sampai saat ini, hubungan langsung antara media sosial, praktik jurnalisme di media digital-born, dan fungsi jurnalisme sebagai institusi demokrasi masih kurang dieksplorasi secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih fokus pada sudut pandang jurnalis untuk memahami bagaimana praktik jurnalistik dijalankan, dihadapi tantangan, dan disesuaikan dalam konteks demokrasi digital di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Indonesia. Metode kualitatif ini dipilih karena memiliki potensi untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Ilhami et al., 2024), yaitu Peran Media Sosial dan Jurnalisme Digital-Born dalam Demokrasi Digital: Implikasi terhadap Praktik Kerja Jurnalis di Indonesia. Proses pengumpulan data berupa pencarian studi literatur dari jurnal nasional dan internasional bereputasi baik seperti Scopus dan Google Scholar, di mana peneliti secara kritis mengevaluasi berbagai bahan pustaka yang relevan dengan materi jurnal yang akan digunakan sebagai referensi. Data Sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam jurnalis yang bekerja di digital born new media. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 plus sebagai bagian dari pendekatan *Computer Assisted Qualitative Data Analysis*

(CAQDAS). Transkrip wawancara dengan jurnalis media digital dianalisis melalui proses *open coding* untuk mengidentifikasi unit makna, kemudian dilanjutkan dengan *axial coding* guna mengelompokkan kode ke dalam tema-tema analitis. Proses ini menghasilkan empat tema utama yang menggambarkan bagaimana praktik jurnalisme digital dijalankan dan dimaknai dalam konteks ruang publik digital dan demokrasi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Media Sosial sebagai Infrastruktur Awal Produksi Informasi Politik

Media sosial dipahami oleh jurnalis sebagai infrastruktur awal dalam proses produksi berita politik. Media sosial digunakan untuk memantau isu-isu yang berkembang, pernyataan aktor politik, serta respons publik terhadap kebijakan atau peristiwa tertentu. Dalam praktiknya, media sosial berfungsi sebagai ruang observasi yang memungkinkan jurnalis membaca dinamika wacana politik secara cepat dan luas.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Media sosial itu lebih ke alat pantau. Kalau ada isu ramai, kita lihat dulu, tapi tidak langsung jadi berita. Tetap harus dicek ke sumber resmi.” (AA, 20 Oktober 2025)

Kutipan ini dikodekan pada node *media sosial sebagai sumber awal dan verifikasi informasi*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial mempercepat sirkulasi informasi politik, legitimasi berita tetap bergantung pada mekanisme jurnalistik yang baku. Jurnalis tidak menempatkan media sosial sebagai sumber otoritatif, melainkan sebagai titik awal yang harus diverifikasi melalui sumber resmi dan prosedur profesional.

Namun demikian, informan menegaskan bahwa media sosial tidak diposisikan sebagai sumber berita yang berdiri sendiri. Informasi yang beredar di platform digital diperlakukan sebagai petunjuk awal yang harus diverifikasi melalui sumber resmi dan mekanisme jurnalistik yang baku. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial mempercepat arus informasi politik, legitimasi berita tetap bergantung pada otoritas jurnalistik dan praktik verifikasi. Dengan kata lain,

jurnalisme masih memainkan peran sebagai penjaga gerbang (gatekeeper), meskipun fungsinya kini dinegosiasikan dalam ruang publik digital yang lebih terbuka dan terdesentralisasi.

Logika Platform dan Tekanan Kecepatan Publikasi

Penelitian ini juga menemukan adanya perubahan signifikan dalam logika kerja jurnalisme seiring peralihan dari media cetak ke media online. Dalam konteks media digital, kecepatan publikasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi proses produksi berita. Jurnalis dituntut untuk merespons dinamika politik secara cepat, terutama ketika isu tersebut telah menjadi perbincangan luas di media sosial. Hal ini terlihat dari informan yang menyatakan :

“Kalau online itu harus cepat. Kalau terlambat, isu sudah lewat.” (J, 20 Oktober 2025)

Berbeda dengan media cetak yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu, media online memungkinkan pembaruan berita secara berkelanjutan. Satu peristiwa politik dapat diberitakan dalam beberapa artikel dengan sudut pandang yang berbeda, mulai dari laporan awal hingga analisis lanjutan. Meskipun demikian, jurnalis menekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga karena kesalahan dalam pemberitaan politik berpotensi menimbulkan konsekuensi etik dan politik yang lebih luas, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap media. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jurnalisme digital berada dalam ketegangan permanen antara tuntutan kecepatan dan tanggung jawab demokratis untuk menyediakan informasi yang akurat dan berimbang.

Lebih jauh, logika platform tidak hanya beroperasi pada tingkat teknis berupa tuntutan kecepatan dan viralitas, tetapi juga pada level struktural yang berkaitan dengan kapitalisme platform dan ekonomi perhatian. Dalam kerangka *platform capitalism* (Srnicek, 2017) , platform digital berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi yang mengakumulasi nilai melalui data dan interaksi pengguna. Mekanisme ini menciptakan apa yang dapat dipahami sebagai *algorithmic visibility power*, yakni kekuasaan algoritmik dalam menentukan isu mana yang memperoleh visibilitas lebih luas di ruang publik digital. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut terlihat melalui

pembentukan enklave algoritmik dan polarisasi berbasis interaksi yang dipicu oleh logika distribusi platform (Lim, 2017) . Isu politik yang memperoleh tingkat keterlibatan (engagement) tinggi memiliki peluang lebih besar untuk diperluas jangkauannya melalui mekanisme distribusi ulang oleh platform, sementara isu yang kurang menarik secara emosional cenderung tenggelam dalam arus informasi. Situasi ini menunjukkan bahwa agenda setting dalam jurnalisme digital-born tidak hanya dinegosiasikan pada level redaksi, tetapi juga dibentuk oleh struktur ekonomi perhatian (*attention economy*) yang mengutamakan intensitas interaksi dibandingkan kedalaman substansi. Dengan demikian, ketergantungan terhadap algoritma bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan bagian dari restrukturisasi kekuasaan dalam produksi dan sirkulasi informasi politik di ruang publik digital.

Media Sosial dan Negosiasi Agenda Setting Politik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam proses pembentukan agenda pemberitaan politik. Isu-isu yang viral di media sosial menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam rapat redaksi. Media sosial berfungsi sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi isu yang memiliki resonansi publik tinggi.

Sebagaimana diungkapkan informan:

“Isu viral itu pasti dibahas di redaksi, tapi tidak semua viral kita angkat. Tetap dilihat nilai beritanya.” (J, 20 Oktober 2025)

Temuan ini mengindikasikan bahwa agenda setting dalam jurnalisme digital merupakan hasil negosiasi antara logika popularitas media sosial dan pertimbangan normatif jurnalisme, seperti kepentingan publik dan relevansi politik. Dengan demikian, media sosial memengaruhi, tetapi tidak sepenuhnya menentukan, arah pemberitaan politik.

Selain itu media sosial dipandang sebagai sarana strategis untuk memperluas jangkauan informasi politik dan menjangkau kelompok audiens yang lebih muda.

Informan menjelaskan:

“Media sosial itu penting buat sebar berita, terutama supaya pembaca muda mau masuk ke website.” (J, 20 Oktober 2025)

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai ruang dialog antara jurnalis dan publik. Respons audiens dalam bentuk komentar, berbagi konten, dan reaksi lainnya menjadi umpan balik yang memengaruhi refleksi redaksi terhadap isu politik yang diberitakan. Hal ini menunjukkan perubahan relasi kekuasaan dalam ruang publik digital, di mana audiens memiliki peran yang lebih aktif dalam proses komunikasi politik.

Hoaks, Disinformasi, dan Tanggung Jawab Demokratis Jurnalisme

Peningkatnya tantangan hoaks dan disinformasi dalam ekosistem media sosial yang menjadi ruang publik digital utama. Jurnalis mengungkapkan bahwa derasnya arus informasi yang beredar di media sosial, sering kali tanpa sumber yang jelas dan tanpa proses verifikasi, secara signifikan menambah kompleksitas kerja jurnalistik. Informasi politik yang beredar dengan cepat baik dalam bentuk klaim, potongan pernyataan, maupun narasi visual menuntut jurnalis untuk bekerja lebih cermat dan berhati-hati agar tidak ikut mereproduksi informasi yang menyesatkan.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Sekarang justru lebih berat, karena banyak informasi tidak jelas beredar cepat.” (J, 20 Oktober 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempercepat distribusi informasi, tetapi juga memperluas ruang bagi beredarnya informasi yang tidak terverifikasi. Dalam kondisi tersebut, jurnalis memaknai perannya sebagai aktor yang harus berfungsi sebagai penyaring dan penilai kredibilitas informasi sebelum disampaikan kepada publik. Proses ini membutuhkan waktu, ketelitian, dan sumber daya tambahan, terutama ketika informasi yang beredar telah terlanjur membentuk persepsi publik.

Lebih jauh, jurnalis menyadari bahwa kesalahan dalam memberitakan informasi yang tidak akurat di tengah iklim politik yang sensitif dapat berdampak serius, baik bagi reputasi media

maupun bagi kualitas demokrasi. Hoaks dan disinformasi politik berpotensi memperkuat polarisasi, menyesatkan publik dalam pengambilan keputusan politik, serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi media. Oleh karena itu, jurnalis memandang verifikasi dan klarifikasi sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab profesional dan demokratis mereka.

Dalam konteks ini, jurnalisme diposisikan sebagai institusi yang berfungsi menyeimbangkan kebebasan berekspresi yang difasilitasi oleh media sosial dengan kebutuhan akan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi, tetapi jurnalis tetap melihat adanya kebutuhan akan otoritas profesional yang mampu membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah fragmentasi ruang publik digital, jurnalisme profesional masih dipahami sebagai pilar penting dalam menjaga kualitas diskursus politik dan deliberasi demokratis.

Selain itu, temuan mengindikasikan bahwa tantangan hoaks dan disinformasi mendorong jurnalis untuk lebih reflektif terhadap praktik kerja mereka sendiri. Jurnalis tidak hanya dituntut untuk cepat, tetapi juga untuk bertanggung jawab secara etik dan politik. Dalam situasi ini, peran jurnalis tidak sekadar menyampaikan apa yang sedang ramai dibicarakan, melainkan memastikan bahwa informasi yang masuk ke ruang publik digital telah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa hoaks dan disinformasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan demokratis yang menempatkan jurnalisme pada posisi strategis dalam menjaga kualitas informasi publik di era digital.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik jurnalisme di media digital-born berlangsung dalam konteks ruang publik digital yang telah mengalami perubahan struktural akibat perkembangan media sosial. Sejalan dengan kajian literatur yang menekankan pergeseran komunikasi politik dari media massa konvensional ke platform digital (Bennett & Pfetsch, 2018a; Norris, 2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi infrastruktur utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi politik. Namun demikian, temuan empiris ini juga menegaskan bahwa pergeseran tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran institusional

jurnalisme dalam demokrasi.

Sebagaimana dibahas dalam literatur tentang ruang publik digital, media sosial sering dipahami sebagai arena yang lebih terbuka, partisipatif, dan terdesentralisasi (van Dijck et al., 2018). Ruang publik digital tidak bersifat netral. Jurnalis yang bekerja di media digital-born beroperasi dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh logika algoritma, kecepatan sirkulasi informasi, dan ekonomi perhatian. Dalam kondisi ini, jurnalis memanfaatkan media sosial sebagai sumber awal untuk memantau isu dan dinamika opini publik, namun tetap mempertahankan praktik verifikasi sebagai dasar legitimasi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi jurnalisme sebagai penyedia informasi yang dapat dipercaya masih dipertahankan, meskipun dijalankan dalam ruang publik yang semakin terfragmentasi.

Temuan ini selaras dengan pandangan Habermas tentang pentingnya rasionalitas diskursus dalam demokrasi, tetapi juga menunjukkan perlunya pembacaan ulang terhadap konsep ruang publik dalam konteks digital. Ruang publik digital memungkinkan partisipasi yang luas, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa arus informasi yang cepat, dangkal, dan sering kali emosional. Dalam situasi tersebut, jurnalisme berperan sebagai aktor yang berupaya menjaga kualitas diskursus politik dengan menyaring, memverifikasi, dan membingkai informasi sebelum disampaikan kepada publik.

Lebih lanjut kekuasaan algoritmik tidak hanya bekerja sebagai sistem teknis yang mengatur distribusi konten, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan visibilitas politik di ruang publik digital. Algoritma memilih dan memprioritaskan konten berdasarkan indikator seperti jumlah interaksi, komentar, durasi tonton, dan pola klik pengguna. Akibatnya, isu politik yang menghasilkan engagement tinggi memiliki peluang lebih besar untuk disebarluaskan, sementara isu yang lebih substantif namun kurang menarik secara emosional cenderung kurang terlihat. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini berkaitan dengan pembentukan enklave algoritmik yang memperkuat segmentasi dan polarisasi informasi (Lim, 2017). Situasi tersebut menunjukkan adanya asimetri kekuasaan antara platform dan organisasi media. Media digital-born bergantung pada infrastruktur

distribusi yang dikendalikan oleh platform, sementara parameter algoritmik tidak sepenuhnya transparan dan tidak berada dalam kontrol redaksi. Dengan demikian, keputusan mengenai sirkulasi isu politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan jurnalistik, tetapi juga oleh logika perhitungan platform yang memprioritaskan atensi dan interaksi pengguna.

Hasil penelitian juga menguatkan literatur yang menyoroati dominasi logika platform dalam praktik jurnalisme digital (Nasrullah, 2020; Nicholls et al., 2017). Tekanan kecepatan publikasi yang dialami jurnalis digital-born menunjukkan bahwa ritme kerja jurnalisme kini sangat dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Isu politik yang berkembang dengan cepat menuntut respons segera agar tetap relevan di ruang publik digital. .N,Akantetapi jurnalis menyatakan berupaya mempertahankan independensi editorial di tengah tekanan algoritmik, upaya tersebut tidak selalu berbentuk perlawanan langsung terhadap logika platform. Dalam praktiknya, yang lebih sering terjadi adalah negosiasi dan kompromi. Jurnalis dapat menyesuaikan judul, gaya penyajian, atau waktu publikasi agar lebih sesuai dengan pola distribusi algoritma, tanpa sepenuhnya mengubah isi berita. Namun, ruang gerak ini tetap berada dalam batasan struktur platform yang lebih besar. Visibilitas dan jangkauan konten tetap ditentukan oleh sistem algoritmik yang tidak berada dalam kendali redaksi. Dengan demikian, resistensi yang dilakukan cenderung bersifat taktis dan situasional, bukan perubahan yang mendasar. Relasi antara jurnalis dan platform lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi dalam kondisi ketimpangan kekuasaan, bukan sebagai hubungan yang sepenuhnya otonom. Mereka menyadari risiko politis dan demokratis dari pemberitaan yang tidak akurat, sehingga tetap berupaya menjaga prinsip kehati-hatian dalam memproduksi berita.

Media sosial berperan sebagai indikator awal perhatian publik, tetapi tidak sepenuhnya menentukan arah pemberitaan politik. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa media sosial dapat memperkuat visibilitas isu tertentu melalui mekanisme viralitas (Lim, 2017; Nasrullah, 2020), namun juga memperlihatkan bahwa jurnalis masih menjalankan fungsi seleksi isu berdasarkan nilai berita dan kepentingan publik. Dengan demikian, agenda setting dalam jurnalisme digital-born merupakan hasil negosiasi antara logika popularitas media sosial dan pertimbangan

normatif jurnalisme.

Temuan mengenai hoaks dan disinformasi memperkuat argumen dalam literatur yang menempatkan media digital sebagai arena pertarungan kekuasaan simbolik yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi (Fuchs, 2010). Arus informasi yang tidak terverifikasi di media sosial meningkatkan risiko distorsi informasi politik dan memperlemah kualitas deliberasi publik. Dalam konteks ini, jurnalis memaknai perannya sebagai aktor yang bertanggung jawab menjaga kualitas informasi publik. Verifikasi dan klarifikasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur profesional, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis jurnalisme dalam memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak merusak hak publik atas informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan literatur yang membedakan antara media online arus utama dan media digital-born (Nicholls et al., 2017). Ketergantungan media digital-born terhadap media sosial sebagai saluran utama distribusi informasi menjadikan jurnalis berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap tekanan algoritmik dan dinamika opini publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan tersebut tidak menghilangkan peran jurnalisme sebagai institusi demokrasi. Sebaliknya, jurnalis digital-born justru berada di garis depan dalam menegosiasikan ulang peran jurnalisme di tengah perubahan ruang publik digital.

Secara keseluruhan, praktik jurnalisme di media digital-born tidak dapat dipahami semata-mata sebagai adaptasi teknologis, tetapi sebagai praktik politis yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi. Media sosial telah membentuk ulang cara informasi politik diproduksi dan didistribusikan, tetapi jurnalisme tetap berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga kualitas ruang publik digital. Dengan menghadirkan perspektif jurnalis sebagai subjek penelitian, studi ini melengkapi kajian literatur yang selama ini lebih didominasi oleh pendekatan makro, serta memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipertaruhkan dalam praktik jurnalisme digital di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menunjukkan bahwa platformisasi jurnalisme

tidak hanya memengaruhi distribusi berita, tetapi juga membentuk proses negosiasi internal jurnalis dalam menentukan nilai berita politik di media digital-born. Berbeda dari studi yang umumnya berfokus pada dampak media sosial terhadap audiens atau pada level sistem media secara makro, penelitian ini menempatkan jurnalis sebagai aktor yang secara aktif menafsirkan dan merespons tekanan algoritmik dalam praktik sehari-hari. Temuan ini memperluas kajian tentang logika platform dengan menegaskan bahwa relasi antara media dan platform bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan relasi kekuasaan yang ditandai oleh asimetri struktural dan proses kompromi yang berkelanjutan. Ke depan, penelitian dapat dikembangkan melalui studi komparatif antar platform untuk melihat bagaimana perbedaan karakter algoritma membentuk strategi redaksional yang berbeda, maupun melalui perbandingan antara media digital-born dan media arus utama untuk mengukur tingkat ketergantungan terhadap platform. Kajian longitudinal juga penting dilakukan untuk memahami apakah pola negosiasi ini bersifat situasional atau menunjukkan perubahan yang lebih mendasar dalam praktik jurnanisme politik di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi infrastruktur utama dalam praktik jurnanisme di media digital-born, khususnya dalam produksi dan distribusi informasi politik di ruang publik digital. Media sosial dimanfaatkan jurnalis sebagai ruang observasi awal untuk memantau isu dan dinamika opini publik, namun tidak dijadikan sebagai sumber legitimasi informasi. Proses verifikasi dan klarifikasi tetap menjadi prinsip utama yang menegaskan peran jurnanisme sebagai institusi demokrasi dalam menjaga kualitas informasi publik.

Temuan penelitian mengungkap adanya ketegangan yang terus-menerus antara logika platform media sosial yang menekankan kecepatan, viralitas, dan keterlibatan audiens dengan nilai-nilai normatif jurnanisme, seperti akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Jurnalis digital-born tidak sepenuhnya tunduk pada logika tersebut, melainkan secara aktif menegosiasikan praktik kerja mereka agar tetap selaras dengan tanggung jawab demokratis jurnanisme. Dalam konteks ini,

jurnalisme digital tidak dapat dipahami hanya sebagai adaptasi teknologi, tetapi sebagai praktik politis yang berimplikasi langsung pada kualitas demokrasi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa maraknya hoaks dan disinformasi di media sosial justru memperkuat posisi jurnalisme profesional sebagai aktor kunci dalam ruang publik digital. Jurnalis memaknai perannya sebagai penjaga kualitas diskursus politik, yang berfungsi menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan hak publik atas informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa peran jurnalisme tidak melemah di era digital, melainkan mengalami reposisi dalam ekosistem komunikasi politik yang semakin terdigitalisasi.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik dan demokrasi dengan menghadirkan perspektif mikro dari praktik jurnalisme digital-born di Indonesia, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan pendekatan makro. Secara metodologis, penggunaan analisis kualitatif dengan bantuan NVivo yang dapat memperkuat transparansi dan ketelitian analisis tematik. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat etika jurnalistik dan mekanisme verifikasi dalam ekosistem media digital guna mendukung kualitas demokrasi dan ruang publik digital di Indonesia.

Referensi

- Ahdarrijal, Y., & Rahmawati, D. E. (2024). The Role of Digital Media in Determining the Direction of Indonesia's Democracy in 2023. *The Journal of Society and Media*, 8(1), 144–164. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n1.p144-164>
- Andzani, D., Virgin, D., Pristica, B., & Dwihadiah, D. L. (2024). ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PROSES MEDIATISASI POLITIK: PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK DAN PARTISIPASI PUBLIK. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(1), 1003–1011. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v11i1.55526>
- Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018a). Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres. *Journal of Communication*, 68(2), 243–253. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>

- Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018b). Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres. *Journal of Communication*, 68(2), 243–253. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>
- Dania, R., & Nisa, P. K. (2023). PERAN DAN PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2024. *VIRTU: JURNAL KAJIAN KOMUNIKASI, BUDAYA DAN ISLAM*, Volume 3 Nomor 2. <https://doi.org/10.15408/virtu.vxxx.xxxxx>
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Fuchs, C. (2021). *Social Media: A Critical Introduction (3rd ed.)*. Sage.
- Henkel, I., Thurman, N., Möller, J., & Trilling, D. (2020). Do Online, Offline, and Multiplatform Journalists Differ in their Professional Principles and Practices? Findings from a Multinational Study. *Journalism Studies*, 21(10), 1363–1383. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1749111>
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Indah Sulistiani, Caroline Caroline, & Syarifuddin. (2025). CHANGES IN PUBLIC INFORMATION CONSUMPTION PATTERNS IN THE DIGITAL ERA: A LITERATURE STUDY ON DIGITAL JOURNALISM. *MORFAI JOURNAL*, 5(1), 204–208. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i1.2544>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Nasrullah, R. (2020). *MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF KOMUNIKASI, BUDAYA DAN SOSIOTEKNOLOGI*. Simbiosis Rekatama Media.

- Nicholls, T., Shabbir, N., & Nielsen, R. K. (2017). The Global Expansion of Digital-Born News Media. *THE REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM*. <https://doi.org/10.60625/risj-y0j7-ck71>
- Norris, P. (2017). *Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks Faculty Research Working Paper Series*. www.hks.harvard.edu
- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10), 91–105. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>
- Park, S., Fisher, C., & Mardjianto, L. (2025, July 15). *Social media domination in Indonesians' news consumption*. https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/07/15/social-media-domination-in-indonesians-news-consumption.html?utm_source=chatgpt.com
- Reguero-Sanz, I., Berdón-Prieto, P., & Herrero-Izquierdo, J. (2023). Journalism in Democracy: A Discourse Analysis of Twitter Posts on the Ferrerasgate Scandal. *Media and Communication*, 11(2). <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6314>
- Saroso, B. (2024). The Changing Nature of News Media: Exploring The Impact of Digitalization And Social Media on Journalism Practices And Audiences. *Indonesian Journal of Law*, 1(8).
- Setiawati, T., Tiara, A., & Mustika, S. (2023). Social Media as a Negative Source of Political News in a Polarized Society? Indonesian and Filipino Students' Perception. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 243–256. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art7>
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>